

Bab V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang tahun 2010-2019 jika diukur menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dikategorikan bersifat instruktif , karena Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kupang sangat bergantung kepada bantuan dari pihak ekstern (dalam hal ini Bantuan dari Pemerintah Provinsi , maupun Bantuan dari Pemerintah Pusat). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang meskipun telah mampu menghasilkan pendapatan sendiri seperti (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah) tetapi dapat dikatakan belum mampu mandiri dalam mengelola keuangan daerah..
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang tahun 2010-2019 jika diukur dengan menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dikategorikan sangat tinggi, karena , Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang belum mampu melaksanakan otonomi daerah, karena tingkat ketergantungan

terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tinggi.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang tahun 2010-2019 jika diukur dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan kurang, karena nilai hasil perhitungan masih dibawah 20% , hal ini telah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang belum mampu memaksimalkan penerimaan PAD dengan baik..

5.2. Implikasi Teoritis

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan ini memiliki dampak implikasi kebijakan yang sangat kuat jika dikaitkan dengan Pertumbuhan Keuangan Daerah dan juga pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Maka perlu diadakannya perhitungan dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, dan Derajat Desentralisasi Fiskal.

Beberapa kelemahan masih menjadi keterbatasan dari penelitian dan pembahasan ini. Keterbatasan pertama terkait dengan substansi yang dianalisis. Hampir semua analisis mendasarkan kepada kinerja keuangan APBD semata tidak

mendiskusikan isu lainnya seperti kualitas belanja APBD maupun kelemahan regulasi. Keterbatasan data juga menjadi kendala dimana data yang dimiliki dari 2010-2019 memang sudah bersifat realisasi untuk dilakukan dalam penelitian selanjutnya selain upaya memperluas cakrawala pembahasan baik dari aspek non-APBD.

Implikasi utama dalam perhitungan ini tentu sebagai salah satu bahan evaluasi terkait pelaksanaan prospek ekonomi daerah (otonomi) Kota Kupang ke depan. Maka, Pemerintah Kota Kupang wajib segera meningkatkan kualitas prospek ekonomi daerah dengan mengoptimalkan Sistem Kinerja Keuangan Daerah.

5.3. Implikasi Terapan

Setelah menarik kesimpulan seperti yang telah diuraikan, peneliti memberikan saran untuk:

1. Untuk menurunkan nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Kupang perlu mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan PAD.
2. Untuk menaikkan nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Kupang harus bisa menaikkan jumlah PAD. Hal

ini bisa dilakukan dengan cara seperti pengoptimalan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengembangkan potensi pajak dan atau retribusi daerah. Apabila PAD meningkat maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan Kota Kupang.

3. Untuk meningkatkan nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Pemerintah Kota Kupang harus berupaya meningkatkan jumlah PAD dengan cara mengembangkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang bisa meningkatkan jumlah PAD Kota Kupang. Kurangnya pembekalan kepada personil penagihan yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan penagihan langsung, juga menyebabkan masih kurang maksimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga perlu adanya pelatihan yang lebih rutin kepada personil penagihan yang langsung turun ke lapangan.